



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 100-3.3.1-236 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 100.3.3.1-79 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1-79 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025, perlu diubah untuk disesuaikan dengan Hasil Verifikasi Biro Organisasi dan Tatalaksana Kementerian Dalam Negeri pada Komponen Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Kondisi Kerja serta berdasarkan hasil penilaian kinerja bulanan yang termuat dalam aplikasi eKinerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 100.3.3.1-79 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6718);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri RI dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 Nomor 10);
20. Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 Nomor 108).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran I Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 100.3.3.1-79 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tidak mengubah total pendapatan orang per bulan sebagaimana telah ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Mei 2025.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal, 8 Mei 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



LALU MUHAMAD IQBAL

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 100-3.3.1-236 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 100.3.3.1-79 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2025

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN BEBAN KERJA, PRESTASI KERJA, KONDISI
KERJA, DAN KELANGKAAN PROFESI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025

I. SEKRETARIAT DAERAH (DI LUAR BIRO PENGADAANBARANG DAN JASA, BIRO HUKUMDAN BIRO ORGANISASI).

KELAS JABATAN	BEBAN KERJA (RP)	PRESTASI KERJA (RP)	KONDISI KERJA (RP)	KELANGKAN PROFESI (RP)	TOTAL PENDAPATAN ORANG/PERBULAN (RP)
16	15,690,631.00	15,690,631.00	15,690,631.00	53.818.864,33	100,890,757.33
15	8,101,038.40	9,721,246.08	7,851,775.68	-	25,674,060.16
14	4,554,240.48	7,400,640.78	7,590,400.80	-	19,545,282.06
13	4,087,479.36	6,642,153.96	-	-	10,729,633.32
12	3,268,349.28	5,311,067.58	-	-	8,579,416.86
11	2,526,842.40	4,106,118.90	-	-	6,632,961.30
10	2,197,964.64	3,571,692.54	-	-	5,769,657.18
9	1,911,984.48	3,106,974.78	-	-	5,018,959.26
8	1,536,736.80	2,497,197.30	-	-	4,033,934.10
7	1,354,934.88	2,201,769.18	-	-	3,556,704.06
6	1,177,422.72	1,913,311.92	-	-	3,090,734.64
5	981,934.56	1,595,643.66	-	-	2,577,578.22
4	1,551,920.64	945,701.64	-	-	2,497,622.28
3	1,582,817.14	781,390.74	-	-	2,364,207.88
2	1,615,725.15	646,290.06	-	-	2,262,015.21
1	1,579,446.52	511,190.16	-	-	2,090,636.68

II. BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA.

KELAS JABATAN	BEBAN KERJA (RP)	PRESTASI KERJA (RP)	KONDISI KERJA (RP)	TOTAL PENDAPATAN ORANG/PERBULAN (RP)	KETERANGAN
14	4,744,000.50	8,064,800.85	8,539,200.90	21,348,002.25	-
13	4,087,479.36	851,558.20	11,666,347.34	16,605,384.90	-
12	3,268,349.28	680,906.10	10,349,772.72	14,299,028.10	-
11	2,526,842.40	526,425.50	8,791,305.85	11,844,573.75	-
10	2,197,964.64	457,909.30	8,379,740.19	11,035,614.13	Tim Pokja (P)
10	2,197,964.64	457,909.30	5,128,584.16	7,784,458.10	-
9	1,911,984.48	398,330.10	4,859,627.22	7,169,941.80	-
8	1,536,736.80	320,153.50	8,227,944.95	10,084,835.25	Tim Pokja (P)
8	1,536,736.80	320,153.50	3,745,795.95	5,602,686.25	-
7	1,354,934.88	282,278.10	3,443,792.82	5,081,005.80	-
7	1,354,934.88	282,278.10	8,016,698.04	9,653,911.02	Tim Pokja (P)
6	1,177,422.72	245,296.40	3,286,971.76	4,709,690.88	-
5	981,934.56	204,569.70	3,109,459.44	4,295,963.70	-
4	581,970.24	121,243.80	3,419,075.16	4,122,289.20	-
3	480,855.84	100,178.30	3,426,097.86	4,007,132.00	-
2	397,716.96	82,857.70	3,082,306.44	3,562,881.10	-
1	314,578.56	65,537.20	2,634,595.44	3,014,711.20	-

Catatan : Kelas Jabatan 10, 8 dan 7 dengan keterangan Tim Pokja (P) diberikan untuk pegawai yang memiliki sertifikat Pengadaan Barang Dan jasa dan masuk dalam Tim Pokja PBJ.

III. BIRO HUKUM DAN BIRO ORGANISASI.

KELAS JABATAN	BEBAN KERJA (RP)	PRESTASI KERJA (RP)	KONDISI KERJA (RP)	TOTAL PENDAPATAN ORANG/PERBULAN (RP)
14	4,744,000.50	8,064,800.85	8,064,800.85	20,873,602.20
13	4,087,479.36	6,897,621.42	-	10,985,100.78
12	3,268,349.28	5,515,339.41	-	8,783,688.69
11	2,526,842.40	4,264,046.55	-	6,790,888.95
10	2,197,964.64	3,709,065.33	-	5,907,029.97
9	1,911,984.48	3,226,473.81	-	5,138,458.29
8	1,536,736.80	2,593,243.35	-	4,129,980.15
7	1,354,934.88	2,286,452.61	-	3,641,387.49
6	1,177,422.72	1,986,900.84	-	3,164,323.56
5	981,934.56	1,657,014.57	-	2,638,949.13
4	1,539,796.26	982,074.78	-	2,521,871.04
3	1,572,799.31	811,444.23	-	2,384,243.54
2	1,657,154.00	671,147.37	-	2,328,301.37
1	1,572,892.80	530,851.32	-	2,103,744.12

IV. INSPEKTORAT.

KELAS JABATAN	BEBAN KERJA (RP)	PRESTASI KERJA (RP)	KONDISI KERJA (RP)	TOTAL PENDAPATAN ORANG/PERBULAN (RP)
15	9,347,352.00	10,593,665.60	10,593,665.60	30,534,683.20
14	6,641,600.70	948,800.10	5,218,400.55	12,808,801.35
13	5,960,907.40	851,558.20	4,683,570.10	11,496,035.70
12	4,766,342.70	680,906.10	4,085,436.60	9,532,685.40
11	3,684,978.50	526,425.50	2,895,340.25	7,106,744.25
10	3,205,365.10	457,909.30	2,518,501.15	6,181,775.55
9	2,788,310.70	398,330.10	2,190,815.55	5,377,456.35
8	2,241,074.50	320,153.50	1,760,844.25	4,322,072.25
7	1,975,946.70	282,278.10	1,552,529.55	3,810,754.35
6	1,717,074.80	245,296.40	1,349,130.20	3,311,501.40
5	1,431,987.90	204,569.70	1,125,133.35	2,761,690.95
4	848,706.60	121,243.80	1,636,791.30	2,606,741.70
3	701,248.10	100,178.30	1,682,995.44	2,484,421.84
2	580,003.90	82,857.70	1,723,440.16	2,386,301.76
1	458,760.40	65,537.20	1,638,430.00	2,162,727.60

V. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

KELAS JABATAN	BEBAN KERJA (RP)	PRESTASI KERJA (RP)	KONDISI KERJA (RP)	TOTAL PENDAPATAN ORANG/PERBULAN (RP)
15	9,347,352.00	10,593,665.60	6,854,724.80	26,795,742.40
14	6,641,600.70	948,800.10	4,933,760.52	12,524,161.32
13	5,960,907.40	851,558.20	4,428,102.64	11,240,568.24
12	4,766,342.70	680,906.10	3,540,711.72	8,987,960.52
11	3,684,978.50	526,425.50	2,737,412.60	6,948,816.60
10	3,205,365.10	457,909.30	2,381,128.36	6,044,402.76
9	2,788,310.70	398,330.10	2,071,316.52	5,257,957.32
8	2,241,074.50	320,153.50	1,664,798.20	4,226,026.20
7	1,975,946.70	282,278.10	1,467,846.12	3,726,070.92
6	1,717,074.80	245,296.40	1,275,541.28	3,237,912.48
5	1,431,987.90	204,569.70	1,063,762.44	2,700,320.04
4	848,706.60	121,243.80	1,600,418.16	2,570,368.56
3	701,248.10	100,178.30	1,632,906.29	2,434,332.69
2	580,003.90	82,857.70	1,698,582.85	2,361,444.45
1	458,760.40	65,537.20	1,605,661.40	2,129,959.00

VI. BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH.

KELAS JABATAN	BEBAN KERJA (RP)	PRESTASI KERJA (RP)	KONDISI KERJA (RP)	TOTAL PENDAPATAN ORANG/PERBULAN (RP)
15	6,231,568.00	8,599,563.84	8,724,195.20	23,555,327.04
14	4,554,240.48	6,546,720.69	-	11,100,961.17
13	4,087,479.36	5,875,751.58	-	9,963,230.94
12	3,268,349.28	4,698,252.09	-	7,966,601.37
11	2,526,842.40	3,632,335.95	-	6,159,178.35
10	2,197,964.64	3,159,574.17	-	5,357,538.81
9	1,911,984.48	2,748,477.69	-	4,660,462.17
8	1,536,736.80	2,209,059.15	-	3,745,795.95
7	1,354,934.88	2,004,174.51	-	3,359,109.39
6	1,177,422.72	1,692,545.16	-	2,869,967.88
5	981,934.56	1,472,901.84	-	2,454,836.40
4	1,551,920.64	836,582.22	-	2,388,502.86
3	1,562,781.48	691,230.27	-	2,254,011.75
2	1,640,582.46	571,718.13	-	2,212,300.59
1	1,559,785.36	452,206.68	-	2,011,992.04

- VII. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (DI LUAR ASN SEKOLAH NON GURU), DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, DNAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DINAS KETAHANAN PANGAN, DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, DINAS PERHUBUNGAN, DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA, DINAS PENANAMAN MODAL DAN LAYANAN TERPADU SATU PINTU, DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN, DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN, DINAS PARIWISATA, DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN, DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN, DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, DINAS PERDAGANGAN, DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN, DINAS PERINDUSTRIAN, BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI, DINAS SOSIAL, DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK, DINAS KESEHATAN, BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

KELAS JABATAN	BEBAN KERJA (RP)	PRESTASI KERJA (RP)	KONDISI KERJA (RP)	TOTAL PENDAPATAN ORANG/PERBULAN (RP)
15	6,231,568.00	8,599,563.84	8,724,195.20	23,555,327.04
14	4,554,240.48	5,787,680.61	-	10,341,921.09
13	4,087,479.36	5,194,505.02	-	9,281,984.38
12	3,268,349.28	4,153,527.21	-	7,421,876.49
11	2,526,842.40	3,211,195.55	-	5,738,037.95
10	2,197,964.64	2,793,246.73	-	4,991,211.37
9	1,911,984.48	2,429,813.61	-	4,341,798.09
8	1,536,736.80	1,952,936.35	-	3,489,673.15
7	1,354,934.88	1,721,896.41	-	3,076,831.29
6	1,177,422.72	1,496,308.04	-	2,673,730.76
5	981,934.56	1,329,703.05	-	2,311,637.61
4	1,539,796.26	739,587.18	-	2,279,383.44
3	1,632,906.29	611,087.63	-	2,243,993.92
2	1,698,582.85	505,431.97	-	2,204,014.82
1	1,605,661.40	399,776.92	-	2,005,438.32

VIII. BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH.

KELAS JABATAN	BEBAN KERJA (RP)	KONDISI KERJA (RP)	TOTAL PENDAPATAN ORANG/PERBULAN (RP)
15	6,231,568.00	5,608,411.20	11,839,979.20
14	4,554,240.48	3,320,800.35	7,875,040.83
13	4,087,479.36	2,980,453.70	7,067,933.06
12	3,268,349.28	2,383,171.35	5,651,520.63
11	2,526,842.40	1,842,489.25	4,369,331.65
10	2,197,964.64	1,602,682.55	3,800,647.19
9	1,911,984.48	1,433,988.36	3,345,972.84
8	1,536,736.80	1,184,567.95	2,721,304.75
7	1,354,934.88	1,044,428.97	2,399,363.85
6	1,177,422.72	932,126.32	2,109,549.04
5	981,934.56	981,934.56	1,963,869.12
4	581,970.24	1,357,930.56	1,939,900.80
3	480,855.84	1,322,353.56	1,803,209.40
2	397,716.96	1,300,865.89	1,698,582.85
1	314,578.56	1,225,545.64	1,540,124.20

IX. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI, RUMAH SAKIT Jiwa Mutiara Sukma, Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir, Rumah Sakit Mata dan Rumah Sakit Mandalika.

KELAS JABATAN	BEBAN KERJA (RP)	KONDISI KERJA (RP)	TOTAL PENDAPATAN ORANG/PERBULAN (RP)	KETERANGAN
15	7,477,881.60	2,118,733.12	9,596,614.72	-
15	7,477,881.60	16,077,445.44	23,555,327.04	Rumah Sakit Mandalika
14	5,692,800.60	2,846,400.30	8,539,200.90	-
14	5,692,800.60	4,649,120.49	10,341,921.09	Rumah Sakit Mandalika
13	5,109,349.20	936,714.02	6,046,063.22	-
13	5,109,349.20	4,172,635.18	9,281,984.38	Rumah Sakit Mandalika
12	4,085,436.60	748,996.71	4,834,433.31	-
12	4,085,436.60	3,336,439.89	7,421,876.49	Rumah Sakit Mandalika
11	3,158,553.00	579,068.05	3,737,621.05	-
11	3,158,553.00	2,579,484.95	5,738,037.95	Rumah Sakit Mandalika
10	2,747,455.80	503,700.23	3,251,156.03	-
10	2,747,455.80	2,243,755.57	4,991,211.37	Rumah Sakit Mandalika
9	2,389,980.60	517,829.13	2,907,809.73	-
9	2,389,980.60	1,951,817.49	4,341,798.09	Rumah Sakit Mandalika
8	1,920,921.00	416,199.55	2,337,120.55	-
8	1,920,921.00	1,568,752.15	3,489,673.15	Rumah Sakit Mandalika
7	1,693,668.60	395,189.34	2,088,857.94	-
7	1,693,668.60	1,383,162.69	3,076,831.29	Rumah Sakit Mandalika
6	1,471,778.40	367,944.60	1,839,723.00	-
6	1,471,778.40	1,201,952.36	2,673,730.76	Rumah Sakit Mandalika
5	1,227,418.20	511,424.25	1,738,842.45	-
5	1,227,418.20	1,084,219.41	2,311,637.61	Rumah Sakit Mandalika
4	727,462.80	933,577.26	1,661,040.06	-
4	727,462.80	1,551,920.64	2,279,383.44	Rumah Sakit Mandalika
3	601,069.80	971,729.51	1,572,799.31	-
3	601,069.80	1,642,924.12	2,243,993.92	Rumah Sakit Mandalika
2	497,146.20	977,720.86	1,474,867.06	-
2	497,146.20	1,706,868.62	2,204,014.82	Rumah Sakit Mandalika
1	393,223.20	1,035,487.76	1,428,710.96	-
1	393,223.20	1,612,215.12	2,005,438.32	Rumah Sakit Mandalika

X. BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI.

KELAS JABATAN	BEBAN KERJA (RP)	PRESTASI KERJA (RP)	KONDISI KERJA (RP)	TOTAL PENDAPATAN ORANG/PERBULAN (RP)
12	3,268,349.28	4,834,433.31	2,315,080.74	10,417,863.33
11	2,526,842.40	3,737,621.05	2,842,697.70	9,107,161.15
10	2,197,964.64	3,251,156.03	2,472,710.22	7,921,830.89
9	1,911,984.48	2,828,143.71	2,150,982.54	6,891,110.73
8	1,536,736.80	2,273,089.85	3,009,442.90	6,819,269.55
7	1,354,934.88	2,004,174.51	2,201,769.18	5,560,878.57
6	1,177,422.72	1,741,604.44	2,526,552.92	5,445,580.08
5	981,934.56	1,452,444.87	2,229,809.73	4,664,189.16
4	581,970.24	860,830.98	3,140,214.42	4,583,015.64
3	480,855.84	711,265.93	3,295,866.07	4,487,987.84
2	397,716.96	588,289.67	2,991,162.97	3,977,169.60
1	314,578.56	465,314.12	3,106,463.28	3,886,355.96

XI. SEKOLAH (SMA, SMK, SLB) NON-GURU

KELAS JABATAN	BEBAN KERJA (RP)	PRESTASI KERJA (RP)	TOTAL PENDAPATAN ORANG/PERBULAN (RP)
10	2,060,591.85	1,831,637.20	3,892,229.05
9	1,792,485.45	1,872,151.47	3,664,636.92
8	1,440,690.75	1,856,890.30	3,297,581.05
7	1,354,934.88	1,721,896.41	3,076,831.29
6	1,177,422.72	1,496,308.04	2,673,730.76
5	981,934.56	1,329,703.05	2,311,637.61
4	1,539,796.26	739,587.18	2,279,383.44
3	1,632,906.29	611,087.63	2,243,993.92
2	1,698,582.85	505,431.97	2,204,014.82
1	1,605,661.40	399,776.92	2,005,438.32

XII. RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA.

KELAS JABATAN	NAMA JABATAN	KONDISI KERJA ORANG/PERBULAN (RP)	KELANGKAAN PROFESI ORANG/PERBULAN (RP)
12	DOKTER MADYA SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA	-	25.057.344,48
12	DOKTER MADYA SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	8.102.782,59	-
10	DOKTER MUDA SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA	-	22.483.346,63
10	DOKTER MUDA SPESIALIS SARAF	10.074.004,60	-
10	DOKTER GIGI MUDA SPESIALIS KONSERVASI GIGI	7.097.594,15	-
9	DOKTER PERTAMA SPESIALIS FISIK DAN REHABILITASI MEDIK	7.090.275,78	-

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



LALU MUHAMAD IQBAL

